

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi adalah tujuan utama dalam penyelenggaraan suatu negara. Berbagai strategi dilakukan oleh setiap negara agar mampu mencapai kondisi kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Namun, dari berbagai penelitian yang telah banyak dilakukan menunjukkan bahwa banyak faktor-faktor dalam variabel ekonomi makro dan mikro yang harus dipenuhi agar tujuan negara tersebut tercapai.

Perkembangan arus globalisasi khususnya dalam ruang lingkup ekonomi yang semakin pesat tanpa batas membuat ekonomi dunia terarah kepada pasar bebas. Pasar bebas dan kompetisi yang semakin ketat di era global ini menuntut semua negara di dunia, terutama negara berkembang seperti Indonesia untuk semakin giat melakukan pembangunan ekonominya agar mampu bersaing dan tidak tertinggal dengan negara lainnya (Kadarisman, 2011).

Keberhasilan pembangunan ekonomi dijabarkan melalui data statistik pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan berkelanjutan dengan tren yang semakin naik. Menurut Todaro dalam Jenicek (2016), pembangunan ekonomi dicapai sebagai sebuah proses multidimensi yang melibatkan perubahan yang besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan dalam ketimpangan, dan juga pengurangan dalam kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan *output*, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah (Adisasmita, 2013). Pada konteks pertumbuhan ekonomi daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi indikator yang menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi. Tingginya nilai PDRB menunjukkan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut yang berarti kemajuan dalam perekonomian daerah tersebut meningkat.

Menurut Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta (2017), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu.

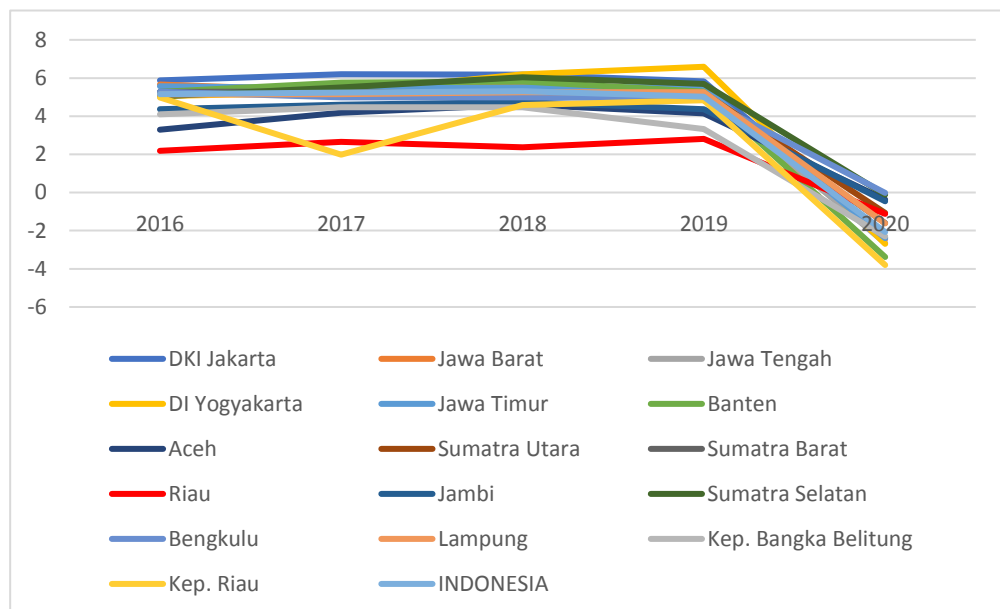
Berdasarkan tinjauan regional berdasarkan pulau, penyumbang PDRB terbesar di Indonesia adalah Pulau Jawa. Hal tersebut dikarenakan di Pulau Jawa terdapat pusat pemerintahan yaitu DKI Jakarta. Selain itu, Pulau Jawa merupakan daerah yang dijadikan pusat pembangunan ekonomi karena memiliki kepadatan penduduk terbesar di Indonesia. Berbagai fasilitas yang mendukung proses pertumbuhan ekonomi mulai dari sektor industri, perbelanjaan, pendidikan, hingga infrastruktur yang ada di Pulau Jawa bisa dikatakan lebih lengkap dan memadai dibandingkan di wilayah lain. Pulau Jawa menjadi pusat segala macam bisnis dan perputaran uang terbesar.

Struktur perekonomian Indonesia secara umum masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa kemudian disusul di Pulau Sumatera dibandingkan dengan wilayah lainnya. Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (2021), dapat diketahui bahwa PDB Indonesia pada tahun 2016 tumbuh sebesar 5,16%. Kemudian pada tahun 2017 pertumbuhan PDB Indonesia mengalami kenaikan menjadi sebesar 5,23%. Di Jawa dan Sumatera kenaikan ini diikuti oleh PDRB di hampir semua provinsi kecuali Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Bengkulu, dan Kepulauan Riau.

Selanjutnya pada tahun 2018 pertumbuhan PDB Indonesia kembali mengalami kenaikan yakni tumbuh sebesar 5,31%. Kesimpulannya adalah pertumbuhan PDB di Indonesia pada periode tahun 2016 sampai dengan 2018 terus mengalami kenaikan dan mencerminkan bahwa pada kurun tahun tersebut secara rata-rata pertumbuhan PDRB pada setiap provinsi di Indonesia cenderung naik.

Pada tahun 2019 hampir semua provinsi di Indonesia terutama di wilayah Jawa-Sumatera mengalami penurunan PDRB, kemudian laju pertumbuhan PDB nasional kembali mengalami penurunan dari 5,31% pada tahun 2018 menjadi 5,02% pada tahun 2019. Di Jawa dan Sumatera provinsi yang tetap mengalami kenaikan nilai PDRB adalah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Lampung, dan Kepulauan Riau. Kemudian pada tahun 2020 semua provinsi secara keseluruhan mengalami penurunan PDRB yang tajam. Pada tahun tersebut tidak ada provinsi yang mengalami kenaikan PDRB.

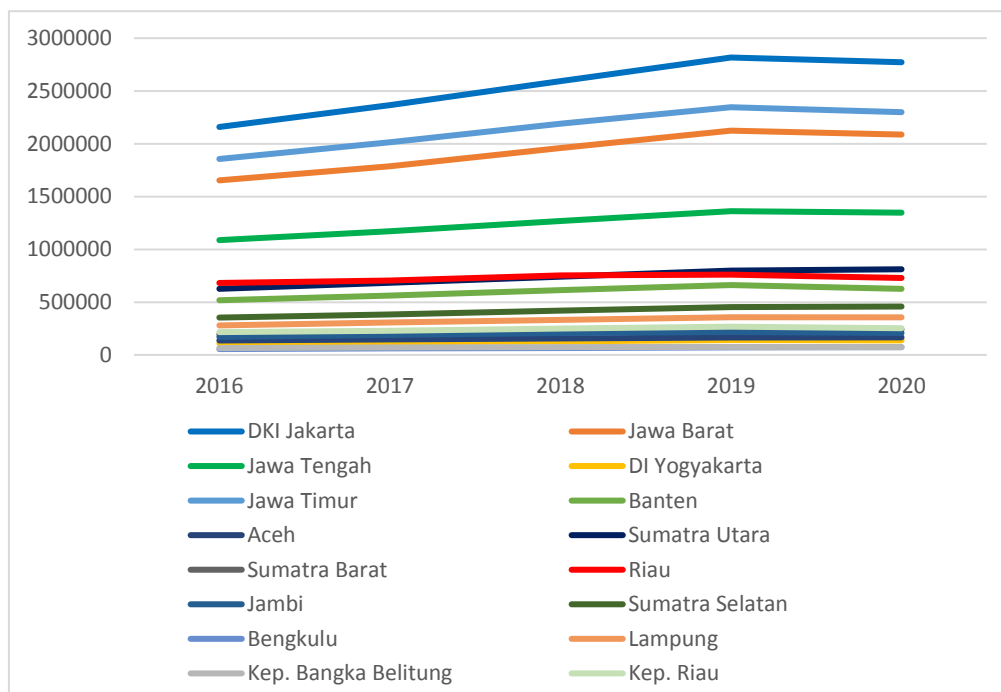
Di antara semua provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera sebagai kontributor pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia, Provinsi Riau menjadi provinsi dengan rata-rata PDRB terendah selama lima tahun kurun waktu 2016-2020. Meskipun Kepulauan Riau menjadi provinsi dengan PDRB terendah pada tahun 2017 dan 2020, namun apabila dari data tersebut dirata-rata selama lima tahun periode tahun 2016 sampai dengan 2020, maka Provinsi Riau menjadi provinsi yang memiliki laju pertumbuhan PDRB terendah di wilayah pulau Jawa-Sumatera.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2021

Gambar 1. Laju PDRB Provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera Atas Harga Konstan Pada Tahun 2016-2020 (Persen)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Riau dapat diketahui bahwa meskipun laju pertumbuhan PDRB Provinsi Riau menjadi provinsi dengan rata-rata PDRB terendah selama lima tahun pada kurun waktu 2016-2020 di kawasan Jawa-Sumatera dan lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, namun PDRB Provinsi Riau dalam kurun waktu 2016-2018 secara nominal menempati urutan ke 6 (enam) di Indonesia dan nomor 1 (satu) di luar Pulau Jawa kecuali tahun 2019 dan 2020 menjadi nomor 2 (dua) di bawah Sumatera Utara.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2021

Gambar 2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera, 2016-2020 (Miliar Rupiah)

Solow dalam teori pertumbuhan neo klasik beranggapan bahwa produktivitas ekonomi bersumber dari tiga faktor, yakni peningkatan dalam kuantitas dan kualitas penduduk atau pekerja, kapital atau modal (melalui tabungan dan investasi), dan peningkatan teknologi. Setiap peningkatan jumlah tenaga kerja, kapital, dan teknologi akan mempengaruhi perubahan pada tingkat *output* yang dihasilkan. Modal yang dimaksud Solow salah satunya berasal dari sektor infrastruktur atau investasi fisik (Sukirno, 2006).

Dengan adanya pembentukan modal investasi yang menempatkan sejumlah dana/modal, maka pembangunan infrastruktur perekonomian menjadi lebih baik. Pembangunan infrastruktur ekonomi adalah langkah awal untuk melakukan kegiatan pembangunan ekonomi suatu wilayah.

Menurut penggunaannya investasi diartikan sebagai pembentukan modal tetap domestik. Untuk meningkatkan jumlah *output* melalui kapasitas produksi yang bernilai positif terhadap suatu perekonomian, kegiatan pembelanjaan faktor produksi sangat diperlukan dengan cara investasi. Penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan marak lesunya pembangunan (Sukirno, 2006).

Investasi dapat berbentuk investasi langsung yakni berupa pembelian aset atau pembentukan usaha baru maupun investasi tidak langsung yakni berupa investasi di pasar uang dan pasar modal. Investasi bisa berasal dari pemerintah dan swasta nasional maupun asing.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal menjelaskan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.

Penanaman Modal Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat PMDN, adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal Dalam Negeri. Penanaman Modal Asing, yang selanjutnya disingkat PMA, adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2015).

Menurut Pujoalwanto (2014), tingginya penanaman modal baik lokal maupun penanam modal asing di suatu negara merupakan salah satu indikator bahwa negara tersebut memiliki sistem perekonomian yang baik, karena didukung oleh kecukupan sumber daya, baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan sistem perekonomian yang didukung sumber daya yang baik akan menarik para investor untuk menanamkan modal. Hal ini akan membawa dampak baik bagi negara dan setiap daerah yang bersangkutan, seperti lapangan kerja yang semakin terbuka, menambah pendapatan daerah, dan mempercepat kemajuan pembangun infrastruktur ekonomi dan sosial di pusat atau daerah.

Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat UUD 1945, pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Setiap daerah memiliki hak otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Setiap provinsi di Indonesia sebagai daerah otonomi sebagai subsistem perekonomian nasional memiliki kebebasan untuk menggali dan mengelola kekayaan daerah masing-masing yang dimiliki dan memanfatkannya untuk segala kepentingan bersama di daerah tersebut termasuk kegiatan pembangunan di provinsi tersebut.

Sesuai amanat UU No. 32 Tahun 2004 perihal Otonomi Daerah di atas, Provinsi Riau merupakan salah satu daerah di Pulau Sumatera yang telah diberi wewenang dalam mengatur roda pemerintahannya, tentunya kesempatan ini menjadi peluang bagi pemerintahan Provinsi Riau untuk dapat menggali berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah serta untuk memajukan pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Riau.

Menurut data DPMPTSP Provinsi Riau (2021), kumulasi realisasi investasi PMA dan PMDN Januari-Desember 2019 mencapai Rp41,80 triliun dari target realisasi investasi tahun 2019 yakni sebesar Rp24 triliun. Realisasi

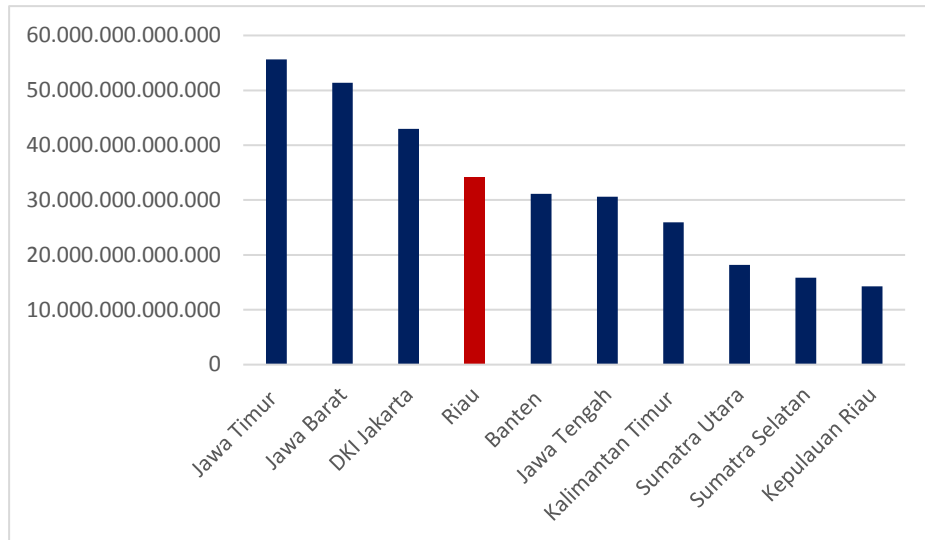
investasi PMDN pada tahun 2019 sebesar Rp26,29 triliun sehingga menempatkan Provinsi Riau pada peringkat provinsi ke-4 secara nasional. Pada Tahun 2020 Provinsi Riau kembali menempati peringkat ke-4 secara nasional dengan nilai realisasi investasi PMDN sebesar Rp34,11 triliun.

Realisasi investasi PMA di Provinsi Riau pada tahun 2019 sebesar US\$1,03 miliar atau setara Rp15,51 triliun menjadikan Provinsi Riau berada pada peringkat provinsi ke-7 sebagai penyumbang investasi PMA terbesar secara nasional. Pada tahun 2020 realisasi investasi PMA Provinsi Riau sebesar US\$1,08 miliar. Memang terjadi kenaikan, namun secara nominal apabila data realisasi investasi tersebut dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya, maka Provinsi Riau menempati posisi ke-11 nilai realisasi investasi provinsi secara nasional (DPMPTSP Provinsi Riau, 2021).

Iklm investasi adalah semua hal yang bisa berpengaruh terhadap risiko dan tingkat pengembalian suatu investasi yang ditanamkan. Hal tersebut meliputi kondisi lingkungan, kebijakan, kondisi politik, dan keamanan baik yang saat ini maupun yang diharapkan dan diprediksikan terjadi di masa yang akan datang. Iklm investasi yang kondusif mendorong investasi dengan biaya dan resiko serendah mungkin dan bisa menghasilkan keuntungan jangka panjang setinggi mungkin (Stern, 2002).

Dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau merupakan wujud nyata pemerintah Provinsi Riau untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap segala investasi demi mewujudkan iklim investasi yang kondusif sehingga berkontribusi positif terhadap perekonomian sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat yang dituangkan dalam peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diterbitkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten atau Kota di Indonesia.

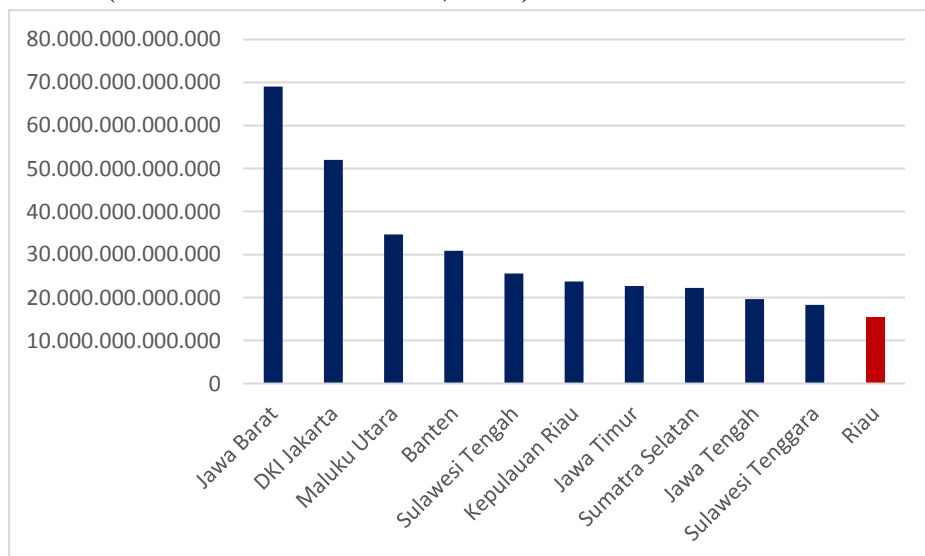
Realisasi investasi PMDN Provinsi Riau pada tahun 2020 menjadi realisasi investasi PMDN provinsi terbesar ke-4 secara nasional di wilayah Indonesia (DPMPTSP Provinsi Riau, 2021).



Sumber : DPMPTSP Provinsi Riau dan BKPM RI, 2021

Gambar 3. Provinsi dengan Nilai Realisasi Investasi PMDN Terbesar di Indonesia 2020 (Rupiah)

Realisasi investasi PMA Provinsi Riau pada tahun 2020 menjadi provinsi dengan nilai realisasi investasi PMA terbesar ke-11 secara nasional di Indonesia (DPMPTSP Provinsi Riau, 2021).

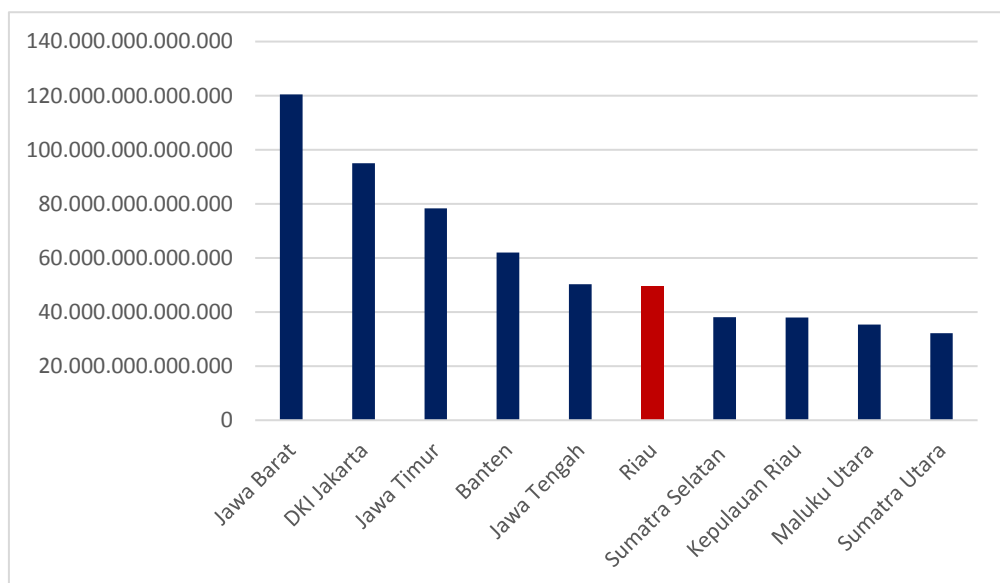


Sumber : DPMPTSP Provinsi Riau dan BKPM RI, 2021

Gambar 4. Provinsi dengan Nilai Realisasi Investasi PMA Terbesar di Indonesia 2020 (Rupiah)

Provinsi Riau seperti menjadi tujuan utama para penanam modal untuk menginvestasikan modalnya di luar Pulau Jawa. Hal ini tidak sejalan dengan laju pertumbuhan PDRB Provinsi Riau yang secara rata-rata menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan PDRB yang paling rendah jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi di wilayah Jawa-Sumatera lainnya.

Berdasarkan data yang gabungan nilai realisasi investasi PMDN dengan nilai realisasi investasi PMA Provinsi di Indonesia, ternyata Provinsi Riau menjadi provinsi dengan nilai investasi terbesar keenam secara nasional. Nilai total investasi Provinsi Riau pada tahun 2020 adalah sebesar Rp49.640.781.480.000. Dengan jumlah tersebut, Provinsi Riau menjadi provinsi di luar Pulau Jawa yang memiliki nilai realisasi investasi terbesar di antara seluruh provinsi lain di Indonesia (DPMPTSP Provinsi Riau, 2021).



Sumber : DPMPTSP Provinsi Riau, 2021

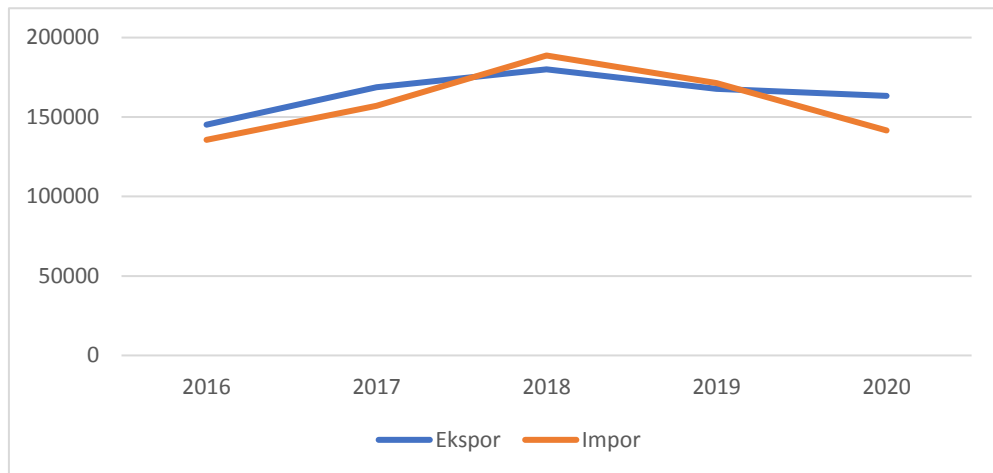
Gambar 5. Provinsi dengan Nilai Realisasi PMDN dan PMA Terbesar di Indonesia 2020 (Rupiah)

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat disebabkan oleh faktor-faktor

produksi yang akan selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya (Sukirno, 2013).

Perdagangan luar negeri meliputi ekspor dan impor memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian melalui pendapatan devisa yang dihasilkan. Devisa yang diperoleh dari ekspor merupakan sumber biaya pembangunan, dikarenakan peningkatan penerimaan devisa dari ekspor akan ikut meringankan beban neraca perdagangan (Halwani, 2005).

Tren ekspor dan impor Indonesia yang berfluktuatif setiap tahunnya tidak sejalan dengan tren pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat. Ekspor dan impor merupakan variabel injeksi dalam perekonomian suatu negara karena adanya proses *multiplier effect* dalam perekonomian tersebut sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Kinerja ekspor impor ini pun menjadi sangat rentan terhadap kondisi ekonomi global yang akan mempengaruhi perekonomian Indonesia (Asbiantari *et al*, 2016).



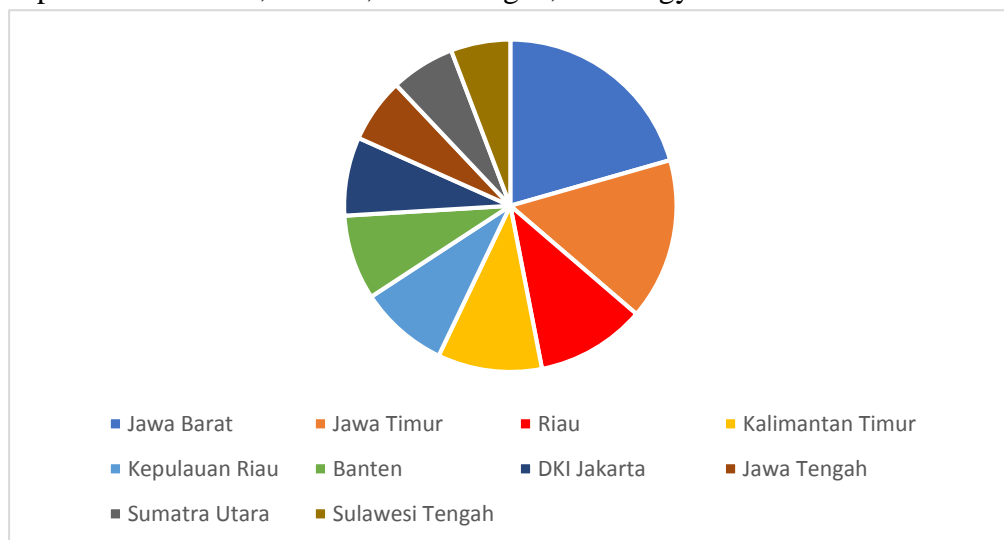
Sumber : BPS dan Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan, 2021

Gambar 6. Neraca Perdagangan Indonesia Periode Tahun 2016-2020 (Juta US\$)

Barang yang diperdagangkan untuk cakupan luar negeri terbagi menjadi dua, yaitu barang migas yang meliputi minyak dan gas dan non-migas yang dapat mencakup produk sektor industri dan pariwisata. Menurut Ekananda (2014), barang-barang yang termasuk migas di antaranya minyak tanah, bensin, solar, dan elpiji. Adapun barang-barang yang termasuk nonmigas yaitu hasil industri seperti kayu lapis, bahan-bahan kimia, peralatan kantor, pupuk,

konfeksi, dan kertas, hasil pertanian dan perkebunan meliputi gula, kelapa sawit, karet, dan kopi, hasil laut dan danau yang meliputi ikan, kerang, udang, dan lain-lain, serta hasil tambang nonmigas seperti biji emas, biji nekel, dan batubara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (2021), dapat diketahui bahwa Provinsi Riau memiliki kontribusi yang cukup besar bagi kegiatan ekspor Indonesia. Riau menduduki posisi ke-3 dengan nilai ekspor US\$13.767,1 juta atau sebesar 11,31% dari total ekspor nasional. Jumlah tersebut mengalahkan jumlah ekspor provinsi-provinsi di Pulau Jawa selain Jawa Barat dan Jawa Timur yang merupakan provinsi dengan kepadatan penduduk terbesar dan merupakan pusat perekonomian dan pemerintahan seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, dan Yogyakarta.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2021

Gambar 7. 10 Provinsi dengan Ekspor Terbesar di Indonesia Tahun 2020 (US\$)

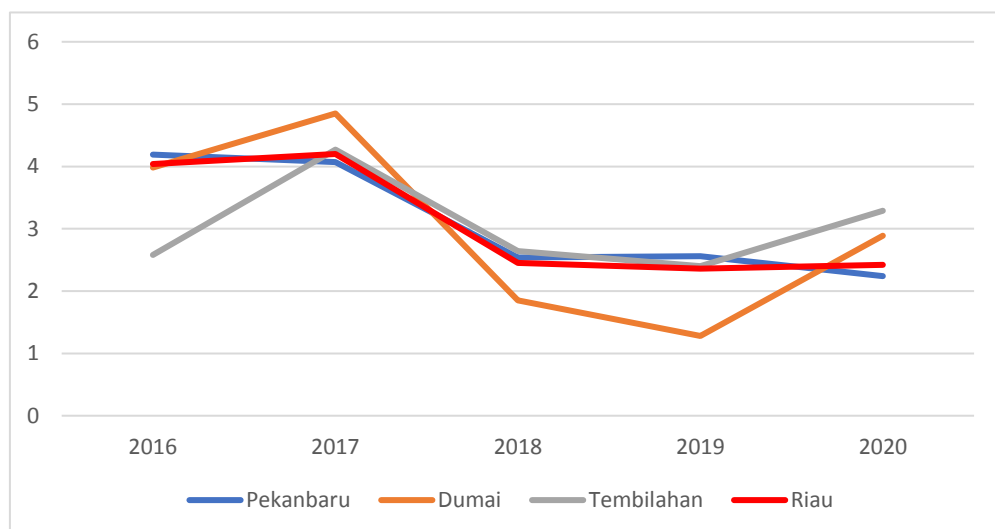
Mubarik (2005) mengemukakan bahwa inflasi yang rendah dan stabil mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Mallik dan Chowdhury (2001) menemukan dua hasil: Pertama, hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi positif dan signifikan secara statistik untuk Bangladesh, Pakistan, India, dan Sri Lanka. Kedua, sensitifitas pertumbuhan terhadap perubahan tingkat inflasi lebih kecil dari inflasi terhadap perubahan tingkat pertumbuhan.

Marbuah (2010) meneliti hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi untuk memastikan apakah efek *threshold* signifikan ada dalam kasus Ghana selama periode 1955-2009. Studi ini menemukan bukti efek ambang signifikan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Datta dan Kumar (2011) menyatakan bahwa ada signifikan hubungan jangka pendek inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi tapi tidak dalam jangka panjang.

Sebenarnya inflasi bukan masalah yang terlalu berarti apabila keadaan tersebut diimbangi oleh tersedianya komoditi yang diperlukan dan ditimpali dengan naiknya pendapatan yang lebih besar dari tingkat inflasi tersebut (Waluyo, 2011).

Inflasi yang tinggi akan menyebabkan turunnya daya beli oleh konsumen. Di samping itu, pendapatan riil yang diperoleh investor dari investasinya akan berkurang karena tingkat inflasi yang tinggi dan begitu pula sebaliknya, jika tingkat inflasi mengalami penurunan, pendapatan riil investor dari hasil investasi yang telah dilakukan juga akan meningkat.

Sesuai data KPw BI Provinsi Riau (2021), laju inflasi di Provinsi Riau mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 4,04% menjadi 4,2% ditahun 2017. Kemudian tahun 2018 tingkat inflasi Provinsi Riau mengalami tren yang menurun atau deflasi sebesar 2,45% hingga tahun 2019 menjadi sebesar 2,36%. Tahun 2020 inflasi Provinsi Riau mengalami kenaikan menjadi 2,42%.



Sumber : Bank Indonesia, 2021

Gambar 8. Laju Inflasi Provinsi Riau per Kota Tahun 2016-2020 (Persen)

PMDN, PMA, ekspor, dan inflasi merupakan faktor-faktor yang penting dalam menentukan naik turunnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dalam kaitannya menaikkan tingkat PDRB. Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan pada penelitian ini membuktikan bahwa masing-masing variabel PMDN, PMA, ekspor, dan inflasi menjelaskan pengaruh dalam hubungannya dengan PDRB. Namun peran tersebut harus dikaji lebih dalam bentuk antara hubungannya, apakah faktor-faktor tersebut benar menjadi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan utama yang akan dibahas dalam penelitian yang dilakukan berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya adalah:

1. Apakah PMDN berpengaruh terhadap PDRB di Provinsi Riau periode tahun 2011–2020?
2. Apakah PMA berpengaruh terhadap PDRB di Provinsi Riau periode tahun 2011–2020?
3. Apakah ekspor berpengaruh terhadap PDRB di Provinsi Riau periode tahun 2011–2020?
4. Apakah inflasi berpengaruh terhadap PDRB di Provinsi Riau periode tahun 2011–2020?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang diuraikan, maka penelitian ini terbatas pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Riau dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu jumlah nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), nilai ekspor, dan tingkat inflasi pada kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian lebih terarah sehingga tujuan penelitian akan tercapai.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

- a) Untuk menganalisis pengaruh PMDN terhadap PDRB di Provinsi Riau periode tahun 2011-2020.
- b) Untuk menganalisis pengaruh PMA terhadap PDRB di Provinsi Riau periode tahun 2011-2020.
- c) Untuk menganalisis pengaruh nilai ekspor terhadap PDRB di Provinsi Riau periode tahun 2011-2020.
- d) Untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap PDRB di Provinsi Riau periode tahun 2011-2020.

2. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang dipelajari dan menambah wawasan mengenai pengaruh PMDN, PMA, ekspor, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Pertumbuhan ekonomi daerah pada penelitian ini diukur dengan besaran nilai PDRB Provinsi Riau.

Adapun secara praktis kegunaan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian adalah:

- a) Bagi pemerintah daerah terkait, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah daerah sehingga keputusan ekonomi yang dipilih lebih akurat, tepat sasaran, dan merangsang pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik.
- b) Bagi peneliti, sebagai media untuk mengimplementasikan pengetahuan tentang pengaruh PMDN, PMA, ekspor, dan inflasi terhadap PDRB Provinsi Riau.

- c) Bagi ilmu pengetahuan/akademis, memperkaya konsep dan teori yang mendukung terutama tentang PMDN, PMA, ekspor, dan inflasi terhadap PDRB Provinsi Riau dan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkait pengaruh PMDN, PMA, ekspor, dan inflasi terhadap PDRB Provinsi Riau.